

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini pertumbuhan perekonomian semakin meningkat dengan ditunjangnya kemajuan teknologi yang memadai. Dinamika pembangunan nasional saat ini, disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi disisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup, khususnya air secara permanen dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini cukup beralasan, sebab pada kenyataannya menunjukkan bahwa lingkungan didalam negeri kita belum terhindar dari ancaman pencemaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan-perusahaan industri penghasil limbah terutama limbah Bahan Berbahaya dan beracun yang berskala nasional. Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini diakibatkan oleh kelalaian-kelalaian perusahaan industri termasuk industri tekstil yang membuang limbahnya kesungai ditambah limbah tersebut bahan yang membahayakan bagi semua makhluk hidup itu dilakukan dengan cara sembarangan. Selain dari industri, penyumbang limbah bahan berbahaya dan beracun juga dihasilkan oleh limbah domestik, rumah sakit, pertanian dan peternakan.

Selain kelalaian itu sendiri kemudian juga ketidakjujuran perusahaan-perusahaan industri yang membuang limbahnya tidak sesuai baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang boleh dibuang ke lingkungan. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan industri itu harus sesuai dengan baku mutu lingkungan dan juga izin lingkungan, seperti yang diamanatkan dalam pasal

20 ayat (3) dan pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa :¹

Pasal 20 ayat (3)

“ Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup:
dan
- b. Mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan Kewengannya.

Pasal 59 ayat (4)

“Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewengannya.

Kemudian dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan juga bahwa:

“setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”

Dalam pengertian nya sendiri Baku Mutu Lingkungan merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup². Dalam pengertian diatas bahwa baku mutu

¹ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (3) dan pasal 59 ayat (4)

² Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, 2008, hlm 61

lingkungan merupakan komponen terpenting dalam sebuah pengendalian pencemaran lingkungan.

Selain komponen baku mutu lingkungan salah satu yang terpenting juga yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan³.

Kemudian selain harus sesuai baku mutu lingkungan dan memiliki Amdal perusahaan juga harus melaporkan kegiatan yang dihasilkan limbah b3 dalam tiga bulan sekali ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada pasal 52 ayat 3 yang berbunyi :⁴

“Laporan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Segala bentuk pengaturan diatas baik dari baku mutu, analisis dampak lingkungan , izin lingkungan dan juga pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk mengurangi dan mencegah pencemaran, sehingga semua limbah industri ke lingkungan bebas/umum telah memenuhi standar kualitas limbah sesuai dengan yang ditetapkan⁵.

³ *Ibid*, hlm. 95.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

⁵ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, PT Rineka Cipta, 1992, hlm 46

Pencemaran lingkungan hidup baik itu berupa limbah B3 dalam analisis kalangan ahli hukum lingkungan adalah akibat ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi kerap melupakan bahwa ia merupakan bagian dari alam tempat hidupnya.⁶

Untuk mencegah dan mengurangi akibat dari limbah bahan berbahaya dan beracun kabupaten mengeluarkan peraturan berskala daerah dari turunan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah seperti yang tertuang diatas, yaitu Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010 tentang pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disebutkan bahwa :

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang menggunakan B3 dan atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

Dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disebutkan bahwa :

⁶ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008, hlm. 1.

“Catatan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.⁷

Tetapi dalam kenyataannya implementasi peraturan daerah tersebut belum terlaksana dengan optimal dengan beberapa permasalahan yang ada di kabupaten bandung diantaranya :

Dari 216 industri manufaktur (menengah-besar) yang terdata di tahun 2015, 47% industri yang taat secara teknis dalam mengelola limbah cairnya. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas air limbah yang dibuang ke sungai/anak Sungai Citarum. Kegiatan pertanian, baik pengelolaan sawah maupun peternakan memberikan dampak samping berupa limbah cair yang turut masuk ke badan air penerima, menambah beban pencemar yang sudah sedemikian besar. Diperkirakan selama tahun 2015, dari kegiatan pertanian sawah menimbulkan beban pencemar sebesar 18,133 Ton BOD/tahun, 1,612 Ton Total N/tahun, 0,806 Ton Total P/tahun, 0,011 Ton TSS/tahun dan 12,895 m³ pestisida/tahun. Sementara itu dari kegiatan peternakan hewan ternak (sapi, kambing dll) berpotensi menimbulkan beban pencemar 197.016,014 Ton BOD/tahun, sedangkan dari unggas 11.082,52 Ton BOD/tahun.⁸

⁷ Peraturan daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2010 Tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

⁸ Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021

Tabel 1.1

**STATUS PENATAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
PADA KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2010-2015**

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengendalian pencemaran Air						
	Jumlah Industri yang di pantau (menghasilkan Air Limbah)	144	152	163	209	216 (177)	221 (173)
	Industri yang melakukan pengujian kualitas Air Limbah dan melaporkan secara rutin	72,32% (pengujian) 70,44% (pelaporan) 41,07% (rutin)	66% (pengujian) 60% (pelaporan)	60%	60% (pengujian) 58% (pelaporan)	62% 62%	76% (pengujian) 62% (pelaporan)
	Penataan pengendalian pencemaran Air	42%	52%	57%	55%	56%	54%
2	Pengendalian pencemaran udara						
	Jumlah industri yang di pantau (menimbulkan emisi)	170	189	189	189	191	191
	Industri yang melakukan pengujian kualitas udara emisi cerobong limbah dan melaporkan secara rutin	50%	61%	80%	186 (98%)	97%	166 (88%)
	Penataan pengendalian pencemaran udara	46%	69%	77%	85%	87%	87%
3	Pengawasan pengelolaan limbah B3						
	Jumlah industri yang di pantau (menimbulkan Limbah B3)	156	175	174	195	201	207
	Jumlah industri yang melakukan pengelolaan dan pelaporan	38%	43%	61%	54%	85%	84% Mengelola 35% melaporkan

	pengelolaan limbah B3						
	Penataan pengelolaan Limbah B3	38%	42%	50%	44%	45%	43%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup⁹

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari jumlah industri yang menghasilkan Limbah B3 dari tahun 2010 sampai 2015 mngalami peningkatan, selain itu industri yang melaporkan dan pengujian kualitas air cenderung fluktiatif dan juga jumlah industri yang melakukan pengelolaan dan melaporkan pengelolaan cenderung fluktuatif.

Ini di sampaikan juga oleh bapak muhammad syafe'i selaku kasi pengendalian pencemaran lingkungan volume IPAL perusahaan kadang-kadang ada yang sampai keluar dan juga keterlambatan pihak ketiga dalam mengangkut limbah.¹⁰

Menurut Bapak E. Kurniawan selaku kasie Pengendalian pencemaran lingkungan “dalam pengendalian pencemaran lingkungan khusus nya limbah bahan berbahaya dan beracun disebabkan karena kinerja Instalasi Pengolahan Air limbah nya belum optimal.”¹¹

Air limbah mengenai PT MCAB, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Genangan air limbah itu berasal dari luapan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) terpadu milik mereka sendiri. Limbah tersebut yang di buang ke anak sungai

⁹ Dinas Lingkungan hidup kabupaten bandung

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Syafe'i Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tanggal 22 Februari 2018 Pukul 11:11 WIB

¹¹ Hasil Wawancara dengan Staff Pengendalian Pencemaran Lingkungan

citarum tersendat mengakibatkan limbah membanjiri kantor. Limbahnya berwarna hitam pekat, berminyak dan mengeluarkan bau tidak sedap. Kepala desa pasawahan mamet selamat mengkhawatirkan limbah tersebut kepada warga, menurutnya pengelolaan limbah tersebut belum masimal, debit air begitu tinggi sementara hasil pengolahan belum maksimal (detik.com, selasa 24 juli 2018, 14:38).¹²

Selain dari pihak pengusaha, pihak dinas lingkungan hidup mengalami masalah diantara nya kurang nya sumber daya manusia dan anggaran.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Bandung di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah.”**

B. Rumusan Masalah

Mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang dibuat menjadi peraturan di sebuah daerah baik itu provinsi, kabupaten/ kota bukanlah dengan tanpa pertimbangan. Proses yang dilalui pemeritah Kabupaten Bandung dan sebagian lapisan masyarakat merupakan keinginan bersama dalam mengembangkan lingkungan yang bersih yang terhindar dari limbah bahan berbahaya. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2010, baik pemerintah dan masyarakat dituntut untuk patuh dan taat menjalankan isi kandungan yang dituangkan dalam peraturan tersebut.

¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4130765/air-limbah-genangi-pabrik-ipal-terpadu-di-dayeuhkolot-bandung>

Dari uraian di atas maka agar penelitian yang dilaksanakan dapat terarah dan mencapai hasil yang diinginkan maka diperlukan rumusan masalah yang menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun?
2. Apa Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah No. 6 Tahun 2010 di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah No.6 Tahun 2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian dari permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang pengendalian pengelolaan limbah berbahaya dan beracun di kabupaten bandung.
2. Untuk mngetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan perda No 6 Tahun 2010 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten bandung no 6 tahun 2010 Tentang

pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di kabupaten bandung.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mendapat manfaat baik dan positif secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah limbah berbahaya dan beracun.
- 2) Memperoleh pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 di Kabupaten Bandung.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman pemerintah daerah Kabupaten Bandung khusus nya Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga, Mengelola dan mengendalikan limbah berbahaya dan beracun.

- 2) Bagi masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui dan berperan aktif dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pengendalian pengelolaan limbah berbahaya dan beracun di Kabupaten Bandung.

- 3) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti tentang peraturan daerah dan pelaksanaanya

Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang tujuan suatu peraturan daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang peraturan daerah ini. Hanya saja penulis menemukan tulisan tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam mewujudkan Kota Yang Unggul Nyaman dan Sejahtera sebagai judul skripsi Wimpy Erika dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018

Dalam skripsi Wimpy Erika tertuang yang menjadi pembahasan dan permasalahan utama adalah peraturan daerah yang sudah ada tidak membedakan antara limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh perusahaan atau rumah sakit dengan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan atau rumah sakit dengan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga karena jumlahnya pun berbeda. Kurangnya anggaran, sarana prasarana kemudian kurang sadarnya masyarakat dan peduli terhadap lingkungan dan kemudian kebudayaan dengan membuang sampah.

Perbedaan dan persamaan objek kajian materil dan formilnya antara skripsi yang di paparkan Wimpy Erika dan penulis adalah sama-sama ditinjau dari siyasah dusturiyah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wimpy Erika memiliki pertanyaan penelitian bagaimana mekanisme pelaksanaan peraturan daerah kota

bandung No. 02 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pengendalian Limbah bahan berbahaya dan beracun, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah Kota bandung No. 02 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun, bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam pelaksanaan peraturan daerah kota bandung no. 02 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Secara objek kajian materil dan formilnya antara penulis dan wimpy erika ada sedikit kesamaan dalam mengusung peraturan daerah hanya saja ada perbedaan dalam rumusan masalah dan objek penelitiannya berbeda yaitu penulis meneliti implementasi peraturan daerah nomor 06 tahun 2010 tentang pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di kabupaten bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Sebagai sumber pokok ajaran islam, pada hakikatnya al-quran secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh al-quran, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).¹³

Oleh sebab itu, objek kajian dari fiqh siyasahnya meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik bersifat intern suatu negara maupun bersifat ekstern antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memuaskan perhatian pada aspek pengaturan.¹⁴

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan umat/rakyat didalam setiap wilayah Negara Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Bandung. Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemimpin/pemerintah yang tertuang dalam perda tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan bagi negara, daerah, dan rakyatnya. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang kongkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm. 13

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2003. Hlm. 29

masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan *nash-nash* yang ada dalam al-Quran maupun as-Sunnah, terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.¹⁵

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemangku jabatan /kekuasaan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari meraka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.¹⁶

Allah berfirman dalam QS. An-nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha mendengar, Maha melihat.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani. *Op Cit.*, hlm. 27

¹⁶ A. Djazuli. *Op. Cit.*, hlm. 31

(QS. An-Nisa: 58).¹⁷

Ayat ini memerintahkan kepada kaum mukmin untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum diantara manusia dengan sebaik-baiknya (adil). Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan pada salah satu pihak. Usaha ini dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan dengan rasa maslahat.

Kemudian dipertegas lagi dengan Hadist Nabi :

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ)

Artinya :

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran”. (HR. Bukhari).¹⁸

Dari kedua hukum diatas, diperjelas kembali dengan kaidah *fiqh siyasah*, yaitu sebagai berikut :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ.

Artinya :

¹⁷ Anonimous, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta. 2009. Hlm. 128

¹⁸ A. Djazuli. *Op.cit.*, hlm. 31

“kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”.¹⁹

Pelaksanaan peraturan dalam kajian fiqh siyasah disebut juga dengan konsep tanfidziyah, konsep tanfidziyah ini untuk menjalankan pedoman-pedoman tuhan yang disampaikan melalui Al-qur'an dan As-sunnah untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari.²⁰ Adapun prinsip-prinsip dalam melaksanakan sebuah hukum adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Tauhid, ketetapan tauhid ang dinyatakan dalam kalimat *laillaha illa allah*. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum islam itu adalah ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasi kesyukuran kepadanya-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesame manusia dan sesame mahluk lainnya, menghendaki dan menposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan dengan apa yang diturunkan Allah dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Seperti yang berbunyi dalam qur'an surat Al-maidah : 44,45 dan 47).
- b. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, hukum islam digerakan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah dalam filsafat hukum barat diartikan sebagai fungsi sosial engineering hukum. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

¹⁹ *Ibid.* hlm 43

²⁰ <http://zizo07.wordpress.com/2010/04/06/prinsip-prinsip-hukum-islam/>

didasarkan pada QS. Al-imran ayat 110, pengkategorian amar ma'ruf nahi munkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi madinah, yakni prinsip islam menentang perbudakan dalam penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.²¹

Sedangkan dalam terminologi menurut para ulama adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Dan kewenangan tersebut terjadi disebabkan oleh hal yang dibenarkan oleh syara'. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan bersama, *kedua*, al-I'tibar, arti al-I'tibar adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui segala sesuatunya. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia dibalik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam, *Ketiga*, al- islah dalam ensiklopedia hukum islam islah ini dititik beratkan kepada hubungan antara sesama manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT yaitu upaya untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai persetujuan antar manusia dengan maksud perbaikan.²² Menurut Ali Yafie, ada dua landasan dalam fiqh bi'ah yaitu pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan

²¹ *Ibid*

²² Aiirm59.blogspot.com/2013/04/pengelolaan-lingkungan-hidup/

hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman, kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang berakal dan baligh, melakukannya adalah ibadah, ditegaskan dalam hadis sebagai berikut :

فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“ tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang maupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.” (HR. Imam Muslim)

Terhitung sebagai bentuk bakti manusia terhadap tuhan, sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak dipundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup bukan malah sebaliknya yang merusak dan mengeksploitasinya tersebut harus memperhatikan pula kebiasaan masyarakat setempat, hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Sehingga dari hal itu, perlu adanya kesesuaian antara berbagai macam hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena titik keberhasilan dari suatu kebijakan ada di dalam prosesnya bukan hasil yang di dapat. Karena pengendalian itu termasuk kedalam kewajiban pemerintah dan pemerintah sebagai aktor dari segala kebijakan sebagai abdi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dari satu Negara kesejahteraan. Rasyid berpendapat bahwa pelayanan berkenaan dengan usaha pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin bahwa warga

masyarakat dapat melaksanakan kehidupan secara wajar dan ditunjukan juga untuk membangun dan memelihara keadilan didalam masyarakat.²³

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di jelaskan bahwa. “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, hukum yang berlaku di Indonesia dan umumnya berlaku di setiap daerah selalu menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemaslahatan bagi rakyatnya. Begitu pun dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Bandung.

Pada umumnya implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Oleh karena itu, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang implementasi menurut para ahli :

A. Hanifah

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

B. Guntur sertiawan

²³ Sumardi, N. (2013). *Sosiologi Pemerintahan* . Bogor : Ghalia Indonesia . hlm. 70

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana.

Di sisi lain, studi implementasi juga merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktek nya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli studi kebijakan yaitu :²⁴

1. Menurut kamus Webster dalam Wahab (1991:50)

Implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu tertentu.

2. Jones

Implementasi sebagai *getting the job done “and” doing it*. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana. Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti implementasi kebijaksanaan

²⁴ Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung: 2014, hlm. 138

merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah., Menurut Jones, pelaksanaannya menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resourch*. oleh karena itu, lebih lanjut, jones merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resourcessso as to figure out what is to be done*”. Dalam hal ini implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan.

C. Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (1974 : 447).

Menguraikan batasan implementasi yaitu, implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

D. Mazmanian & Sabatier

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Dalam pengertian diatas memeperlihatkan bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma untuk mencapai tujuan.

Tabel 1.2

Skema Kerangka Pemikiran Menurut Edward III

Unsur	Indikator	Instrumen wawancara	Fakta
Implementasi kebijakan Edward III	komunikasi	Bagaimana komunikasi dinas Lingkungan Hidup terhadap perda ini?	komunikasi dinas yaitu dengan sosialisasi ke industri itu setiap tahun dengan mengundang ke dinas diberi pemahaman dan pengarahan sesuai dengan perda dan juga pembinaan di lapangan
	Sumber daya	Sumber daya untuk mengimplementasikan perda ini apakah memadai atau tidak?	Pengawasan dari pihak kita kekurangan personil kan jumlah industrinya banyak, tidak sebanding dengan jumlah pegawai nya, jumlah PNSnya sendiri berjumlah dua orang, sedangkan jumlah PHL nya tiga orang”
	disposisi	Bagaimana disposisi/sikap pelaksana di dinas lingkungan hidup sendiri?	kita sudah melaksanakan dengan baik dengan menindak tegas dengan cara melakukan sanksi baik berupa sanksi administrasi, perdata maupun pidana, tahun 2018 pada sampai bulan maret sudah menindak 8 sanksi

	Struktur birokrasi	Bagaimana struktur birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup sendiri?	kalau pegawai nya pengawas nya kurang di seksi penataan hukum lingkungan saja PPLH satu dan PPNS satu ya kan jumlah pabkrik ratusan jadi untuk itu staff pun juga ikut membantu.
--	--------------------	---	--

Sumber: olahan peneliti

Maka dari hal itu, teori-teori siyasah Dusturiyah yang dapat menunjang hal tersebut ialah :

1. Teori Implementasi
2. Teori Pengendalian
3. Teori Pengelolaan
4. Teori Tanfidziyah

Oleh karena itu, keberhasilan dari teori diatas akan berdampak positif pada terciptanya Pengendalian Pengelolaan Limbah di Kabupaten Bandung.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk menyusun atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sesuai objek yang dibutuhkan sehingga mencapai kejelasannya. Oleh karena itu dengan cara demikian akan mendapatkan apa yang dikehendaki dalam suatu penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian penelitian, adalah sebagai berikut :²⁵

“penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.”

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris), serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori aturan hukum yang ada.²⁶ Dalam penelitian metode deskriptif analisis ini menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Bandung yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung

²⁵ Soerjono soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singka*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 1

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm, 32.

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder.²⁷

3. Jenis data

Adapun jenis penelitian adalah kualitatif, yaitu data memanfaatkan teori yang sebagai penjelas. Untuk mendapatkan teori penjelas tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian analisis data di lapangan, yaitu menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun di Kabupaten Bandung di tinjau dari Siyasah Dusturiyah

4. Sumber data

Menurut Arikunto, sumber data adalah “subyek dari mana data dapat di peroleh”.²⁸ Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Data-data tersebut terdiri dari dua jenis yaitu, data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber dari non manusia. Data manusia diperoleh dari orang yang menjadi informan dalam hal ini orang yang secara

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penetapan Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm 11

²⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

langsung menjadi subyek penelitian. Sedangkan data non manusia diperoleh bersumber dari dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto, dan hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Sumber data dapat berupa sumber data umum yang berupa teori dan sumber data khusus yang berupa buku-buku penunjang majalah, koran, dan literatur-literatur lainnya secara umum berupa dokumen tertulis. Sumber data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini yaitu dari dua faktor, yaitu faktor dari manusia, artinya peneliti bertatap muka dengan orang tersebut untuk dijadikan sumber data. Sedangkan faktor non manusia, disini peneliti menggunakan catatan, rekaman gambar, foto dan observasi.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data pokok atau utama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁹ Data berupa :

1. Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 63

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Seksi Pencemaran Lingkungan, Bendahara Penataan Hukum Lingkungan, Kasi Penataan Hukum Lingkungan dan Staff.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dimana data ini merupakan pelengkap dari data primer dalam menjelaskan masalah yang diteliti berupa bahan pustaka yaitu buku, artikel, dan dokumen resmi.

5. Teknik Pengumpulan data

Beberapa metode pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif, walaupun demikian bisa dikatakan bahwa metode yang paling pokok adalah pengamatan atau observasi dan wawancara mendalam atau *indept interview*.³⁰

Teknik pengumpulan data adalah uraian mengenai teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data variable yang diteliti dan metode yang digunakan.³¹

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu :

1. Bapak Muhammad Syafe'i sebagai Kasie Pengendalian Pencemaran Lingkungan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 22 Februari 2018, bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupatn Bandung

³⁰ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial :Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 172

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikasi Metode Penelitian dalam penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 91.

2. Ibu Intan Kartini S.H sebagai Bendahara Pengeluaran Pmbantu pada seksi Penataan Hukum Lingkungan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan pada hari Senin tanggal 4 juni 2018, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
 3. Bapak Ridwan Dewantara S.H, M.H Kasie Penataan Hukum Lingkungan bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
6. Analisis data
- Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema, maka dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan menggunakan data kualitatif. Data-data yang telah dikumpulkan dan dipilih sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan sumber data sekunder). Kemudian data tersebut dianalisis sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dan hal-hal yang diperbolehkan dalam penelitian tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.